

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi “Evaluasi Tata Kelola Pasar Tradisional di Pemerintah Kota Kupang” berdasarkan pada teori evaluasi kebijakan (William N. Dunn, 2003) yang meliputi 6 indikator yaitu: efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas dalam pengelolaan pasar telah berjalan, namun pencapaian tujuan belum maksimal. Penataan pedagang sudah lebih baik dibanding sebelumnya, tetapi belum sesuai zonasi komoditas. Sarana dasar seperti drainase, kebersihan, dan fasilitas air bersih belum memadai sehingga mempengaruhi kenyamanan pedagang dan pengunjung. Retribusi dipungut tertib, tetapi belum dibarengi peningkatan kualitas layanan pasar.

2. Efisiensi

Efisiensi operasional belum optimal. Pedagang dan masyarakat mengeluhkan fasilitas seperti listrik yang sering tidak berfungsi, MCK yang kurang layak, serta kondisi lapak yang rusak. Dari sisi keuangan, pendapatan retribusi sudah berjalan dan menghasilkan PAD 35%, namun transparansi pengelolaan keuangan belum sepenuhnya

dirasakan oleh pedagang karena mereka tidak mengetahui alokasi dan penggunaan dana retribusi.

3. Keberlanjutan

Belum ada upaya signifikan untuk perbaikan pasar secara berkelanjutan. Tidak ditemukan kegiatan renovasi bangunan kios/los, jalan di sekitar pasar masih rusak, drainase tidak dibenahi, dan listrik sering bermasalah. Tata kelola sampah masih sangat terbatas dan penanganannya belum konsisten.

4. Kecukupan

Ketersediaan sarana prasarana belum memadai untuk menjawab kebutuhan pedagang dan masyarakat. Jumlah MCK terbatas, kondisi drainase buruk, dan penataan lapak tidak sesuai komoditas. Upaya memenuhi kebutuhan dasar pasar belum mampu menyelesaikan masalah utama seperti becek saat hujan, genangan, sampah, dan pencahayaan.

5. Pemerataan,

Akses terhadap fasilitas pasar belum merata bagi seluruh pedagang. Pedagang tetap lebih banyak memperoleh fasilitas dibanding pedagang tidak tetap dan pedagang khusus, sementara pungutan retribusi dilakukan secara seragam tanpa dibarengi kesetaraan pelayanan.

6. Responsivitas

Keluhan pedagang belum mendapat respon memadai. Tidak tersedia kotak saran maupun nomor kontak petugas, sehingga pedagang

kesulitan menyampaikan aspirasi. Tanggapan terhadap persoalan harian seperti sampah, air, atau listrik sering terlambat.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Pasar Oeba telah berjalan namun belum efektif dan belum memenuhi standar tata kelola pasar tradisional yang baik. Kelemahan utama terdapat pada fasilitas, transparansi pengelolaan keuangan, responsivitas layanan, serta minimnya program keberlanjutan pasar.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Tata Kelola Pasar Tradisional di Pemerintah Kota Kupang, peneliti memberikan berapa saran:

1. Pemerintah Kota Kupang dan PD Pasar perlu menyusun Rencana Induk Pengembangan Pasar (RIPP), dokumen ini akan menjadi pedoman pembangunan, renovasi, zonasi pedagang, dan pengembangan ekonomi pasar secara jangka panjang.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana secara bertahap Perbaikan yang mendesak meliputi: perbaikan drainase, renovasi lapak dan kios rusak, penambahan MCK,
perbaikan jalur listrik dan lampu, perbaikan jalan menuju pasar, peningkatan manajemen sampah.
3. Mengembangkan sistem komunikasi dua arah dengan pedagang, menyiapkan kotak saran, nomor layanan pengaduan, atau kanal digital seperti WhatsApp center petugas unit pasar.

4. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan pasar, Pendapatan retribusi yang dihasilkan setiap bulan (Rp132.250.000) dan kontribusi PAD 35% harus dilaporkan secara ringkas melalui papan informasi atau media digital. PD Pasar perlu menyediakan laporan penggunaan dana untuk perawatan fasilitas agar pedagang mengetahui manfaat dari retribusi.
5. Penataan zonasi pedagang berdasarkan komoditas, agar aktivitas perdagangan menjadi lebih tertib, bersih, dan memudahkan pengunjung.
6. Penguatan kapasitas kelembagaan PD Pasar, tahapan awal meliputi: pencatatan elektronik retribusi, sistem data pedagang, transparansi laporan harian/ bulanan.
7. Peningkatan partisipasi pedagang dan masyarakat, Pelibatan pedagang dalam rapat pengelolaan, forum komunikasi, dan evaluasi berkala agar kebijakan pasar benar-benar mencerminkan kebutuhan pengguna pasar.